



Gubernur Akpol Irjen Drs. Boedhi Santoso

”Akpol itu Kaya Warna”



apa yang sudah dihasilkan Akpol setelah hampir tiga tahun menjalankan terobosan barunya?

Inspektur Jenderal Polisi Drs. Boedhi Santoso yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademik Akpol punya sederet jawaban atas pertanyaan itu, mulai dari soal mengapa sistem rekrutmen Akpol kini kembali hanya menerima sumber dari SLTA/SIMU, mengapa terobosan rekrutmen dari sumber S1 justru dihilangkan, hingga soal membangun moral polisi dan obsesi menjadikan wajah Akpol lebih ramah di mata masyarakat. Kepada JAGRATARA, lulusan Akpol tahun 1976 ini juga bicara banyak mengenai pengabdian yang telah diberikan Akpol pada masyarakat, selain soal obsesi pribadinya. Berikut petikan wawancaranya:

BANYAK yang berharap reformasi di tubuh Polri itu bakal menjadi dasar untuk mewujudkan mimpi lahirnya polisi yang berwatak santun (civil police); melayani dan mengayomi masyarakat. Reformasi yang diharapkan mampu secara bertahap melunturkan watak feodalistik,

yang sulit dipungkiri masih banyak dipraktikkan dalam pelaksanaan tugas aparat kepolisian. Nah, dalam konteks inilah terlihat betapa penting dan strategisnya peran Akpol sebagai garda depan Polri untuk melahirkan aparat ideal seperti yang diimpikan rakyat. Lalu,

AKPOL selalu memiliki tema khusus setiap kali akan memulai ataupun menutup tahun pendidikannya. Tahun ini?

Sebetulnya tema khusus tidak ada. Tapi bagaimana agar pendidikan kita sejalan dengan kebijakan “Memantapkan *trust building* dalam rangka menyongsong *partnership building* atau era *networking*. Nah, program-program yang dilaksanakan di 2010 ini terkait dengan upaya



kita membangun *networking*. Di antaranya membuat MoU dengan Universitas Diponegoro dan Unes dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Akpol. *Networking* itu juga dilakukan dengan perangkat pendukung kesehatan taruna, yaitu dengan rumah sakit setempat. Kemudian, untuk membangun karakter dan moral taruna, kita melakukan MoU dengan ESQ Leadership Centre yang dipimpin Prof Ary Ginanjar. Kegiatannya berupa *in house training* yang tujuannya untuk memantapkan emosional spiritual taruna. Jadi, lengkaplah apa yang melekat pada para taruna kita: memiliki *knowledge* yang bagus, memiliki kebugaran dan kesehatan yang bagus, juga moral dan karakternya. Itulah yang kita kerjakan di tahun 2010 ini.

Lalu, tentang tag line "45 Tahun Akpol Striving for Excellence" bisa dijelaskan?

Striving for Excellence artinya menuju kesempurnaan. Sekarang ini pada usia Akpol ke 45 tahun kita memang sedang mempersiapkan, menuju ke arah sana, dengan program lulusan Akpol yang bergelar sarjana Strata 1 (S1). Artinya, Akpol sekarang akan mendidik perwira-perwira muda yang bergelar S1, bukan lagi sarjana muda atau brigadir. Akpol menuju program S1 ini berdasarkan hasil kajian dan kebijakan pimpinan Polri, bahwa mulai tahun 2010 ini Akpol tak akan lagi menerima calon taruna

lulusan sarjana, tapi Akpol justru akan melahirkan perwira-perwira bergelar S1. Kalaupun kita menerima dari sumber sarjana, itu adalah kaitannya dengan kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan tertentu sesuai dengan kebutuhan bantuan teknis apa yang harus diawaki oleh sarjana yang dipolisikan. Yaitu, Pendidikan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPPS), yang tahun ini kita meluluskan sebanyak 50 PPPS.

Mengapa Akpol sekarang kembali hanya merekrut sumber SLTA/SMU?

Sebenarnya program penerimaan atau rekrutmen Akpol yang berasal dari sumber sarjana didasarkan pada undang-undang tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), dimana disebutkan bahwa pendidikan di lingkungan Polri itu adalah termasuk pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan itu adalah pendidikan profesi, sedangkan pendidikan profesi itu harus setelah sarjana dengan lama pendidikan tak boleh lebih dari dua tahun untuk kebutuhan organisasi. Atas dasar itu maka pada tahun 2007 kita rekrut dari sumber sarjana (S1) di samping ada sumber SMU juga (UU No 2 menyebutkan serendah-rendahnya SMU). Kita juga mengawatirkan UU Sistem Pendidikan Nasional yang bisa juga merekrut sarjana. Sehingga, kurikulum pada waktu itu dimodifikasi, yaitu program SMU itu menempuh pendidikan 3 tahun 5 bulan, sarjana 2 tahun 5 bulan, dan yang terakhir kemarin rekrutmen

tahun 2009 dengan lama pendidikan 1 tahun 6 bulan.

Sebetulnya, apa dasar kebijakan kembali ke SMU/SLTA?

Hasil kajian dan kebijakan pimpinan, yang memberikan semacam alasan bahwa kalau kita rekrut dari sarjana itu masa dinas akan lebih pendek. Katakanlah rata-rata mereka masuk Akpol pada umur sudah 27 tahun, maka pensiunnya nanti pada umur 58 tahun, ini kan usia yang sedang matang-matangnya kok malah pensiun. Untuk itu, guna menghadapi masa depan, maka dibuat kebijakan merekrut kembali ke SMU tapi dengan *output* sarjana. Dengan *output* sarjana ini pun ada alasannya. Pertama, mereka tak perlu lagi meneruskan S1-nya di PTIK – kesempatan ini umumnya baru diperoleh setelah mereka dinas dulu yang waktunya cukup panjang, dan ketika kesempatan meneruskan ke S1 di PTIK itu datang usian mereka justru mulai tua. Dengan pertimbangan itulah maka kita lakukan percepatan, kita akselerasi, dengan meneruskan program S1-nya langsung di Akpol saja, tak perlu ke PTIK.

Kedua, tuntutan perubahan KUHAP yang mensyaratkan seorang penyidik setidaknya sarjana bergelar S1. Lalu kita usulkan kepada pokja yang menggarap KUHAP agar ada jeda waktu 10 tahun. Makanya dengan lulusan Akpol yang sudah meraih gelar Strata 1 diharapkan



lahir inspektur polisi yang akademisi sekaligus. Artinya, praktisi akademisi. Mereka lahir langsung punya gelar S1 sehingga begitu lulus Akpol bisa bertindak sebagai penyidik. Kalau hanya lahir sebagai inspektur saja, mereka tidak punya legalitas sebagai penyidik. Dengan adanya *reasoning* itulah maka disusun kurikulum program pendidikan Akpol menuju S1 (45 Tahun Akpol Striving For Excellence) yang dimulai pada 2010. Nah, Detasemen 45 yang rekrutmen bulan Agustus kemarin sudah menggunakan kurikulum itu dalam proses belajar-mengajarnya. Kurikulum itu sudah digarap Akpol dengan dibantu *outsourcing* dari berbagai perguruan tinggi, seperti Undip, Unes, UGM, juga disponsori oleh UII. Kita juga dibimbing oleh ahli kurikulum dari Depdiknas. Kurikulum dasar sudah kita susun.

Kemudian, terkait dengan legalitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, Akpol juga bermitra dengan PTIK yang sekarang berubah menjadi STIK. Di sana, kurikulum pun disesuaikan. Kalau dulu PTIK mendidik lulusan Akpol selama 4 semester untuk jadi sarjana S1, sekarang STIK mendidik lulusan sarjana. Dengan demikian program pendidikan Akpol yang disambung dengan program pendidikan yang sekarang ini, maka lengkaplah dari hulu ke hilir sudah masuk kurikulum itu semua. Dengan adanya program yang kita

mulai pada 2010, berarti perwira Akpol yang sudah lahir di Akpol sebelum 2010 masih meneruskan di STIK dan akan selesai sampai 2016. Namun demikian mereka boleh saja dan bisa meneruskan di luar STIK, yang penting dalam percepatan untuk mencukupi tuntutan KUHAP tadi. Karena di pendidikan Akpol ada materikulasi yang bisa dimaterikulasikan di perguruan tinggi umum lainnya.

Kurikulum program S1 ini akhirnya sudah diketuk dalam sidang pleno Wandiklat pada 9 Desember di Mabes Polri, di bawah pimpinan Wakapolri selaku ketua Wandiklat. Ini sudah dibicarakan di forum sarasehan, seminar, rakor dengan Sespim, PTIK dan lembaga pendidikan di lingkungan Polri lainnya di bawah pimpinan Kepala Lemdikpol yang baru. Kurikulum itu sudah final dan proses kurikulum itu kita format dalam bentuk durasi pendidikannya 10 semester. Sepuluh ini menganut sesuai ketentuan UU atau Peraturan Menteri Pendidikan, dimana satu semester ada 16 minggu atau sama dengan 4 bulan efektif (bukan kalender). Nah kalau dihitung, 10 semester itu kira-kira 40 bulan atau kalau kalender sama dengan 3 tahun 4 bulan. Jadi lamanya sama dengan program Akpol sebelumnya yang tak melahirkan lulusan S1. Berarti sudah ada percepatan waktu, efisiensi, dan sekaligus meraih gelar sarjana. Harusnya kalau merekrut S1

keluarnya S2, tapi kita kan tidak punya program itu.

Bagaimana dengan kelengkapan pendukung sebagai pelaksana program S1 di Akpol?

Tentunya nanti ada jabatan-jabatan akademik seperti Rektor, Dekan, Guru Besar, Ketua Jurusan termasuk dosen-dosennya. Nah kaitan dengan ini Akpol bernaung di bawah STIK, karena disana ada Senat, Guru Besar. Akpol juga sudah punya Guru Besar, tapi Guru Besar Luar Biasa dari Undip, Unes, UGM dan mitra-mitra pendidikan yang ada di sini dalam rangka memenuhi legalitas.

Terkait dengan akreditasi?

Kita menggunakan akreditasi PTIK, karena kita memang bernaung di bawah PTIK. Dosen-dosen di Akpol harus sesuai dengan ketentuan. Kalau mau melahirkan S1 maka dosennya harus berkualifikasi S2. Kita sudah punya dosen berkualifikasi S2 baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berstatus polisi juga, PNS Polri. Namun itu tak cukup, karena ada mata kuliah tertentu yang memerlukan dosen yang kita datangkan dari PTIK (dosen terbang). Kalau diperkenankan, kita harapkan ada dosen PTIK yang ditarik ke sini. Jadi tenaga pendidikan yang masih betah saya harapkan mau meningkatkan kemampuannya. Tentunya Polri bisa minta ke Depdiknas untuk minta bantuan

anggaran pendidikan nasional yang 20 persen itu bisa dinikmati oleh dosen Polri yang sekolah di luar untuk mengambil S2 dan S3. Biayanya dari lembaga ke lembaga, akpol hanya menyiapkan orangnya. Jadi bukan uangnya Polri, melainkan anggaran pendidikan yang nasional itu. Faktanya, yang saya pantau, anggaran nasional ini belum dapat terserap, belum ada yang memanfaatkan. Termasuk kelengkapan-kelengkapan, ada juga perangkat-perangkat dari Akpol yang menjadi anggota senat STIK, dan ini artinya Akpol dan PTIK merupakan satu kelanjutan. Nanti kalau program itu sudah selesai semua, PTIK sudah menghabiskan yang lulus S1 itu, langkah berikutnya diharapkan sudah mulai dengan program S2 dan S3. Yang selama ini S2 dikelola oleh UI dan PTIK, akan dimulai pada 2011. Jadi mereka bukan S2 KIK lagi tapi S2 Ilmu Kepolisian. Artinya, kajiannya sudah langsung MIK bukan MSI seperti kemarin. Ini akan diberlakukan 2011.

Kalau kemudian kembali merekrut

sumber SMU karena mereka relatif lebih gampang dibentuk?

Jangan salah anggapan. Perkembangan global sekarang sudah sangat mempengaruhi pola berpikir anak-anak SLTA/SMU sekarang. Ingat, intelektual mereka lebih hebat dan moralnya hebat juga. Dunia gemerlap dan kawasan 'abu-abu' bukan jadi hal yang aneh buat mereka. Itu dunia yang tak bisa dibendung lagi, tak bisa dilarang, karena mereka bisa memperolehnya langsung dari dunia maya yang tanpa batas. Kita tidak bisa ngomong itu saru, itu porno, atau ini boleh itu nggak boleh. Dari telepon selular saja mereka bisa mengakses, begitu pula dari laptop. Untuk memagari taruna? Kita tidak punya *intercept*. Yang kita miliki hanya sentuhan-sentuhan, nasehat-nasehat selayaknya orangtua kepada anaknya. Dan ini harus kita lakukan terus, karena kalau tidak bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan di lembaga ini. Ingat, di sini juga ada taruni yang bisa "menyeberang", ada juga antara taruna dengan taruna, taruni dengan taruni. Nah itulah

yang dipagari oleh Korbintarsis selaku pengasuh supaya tak terjadi seperti itu. Pada prinsipnya, di sini pelanggaran apapun bisa kita deteksi namun sentuhan-sentuhan para pengasuh lah yang diutamakan. Karena, bagaimanapun juga, kita tidak punya *intercept* untuk mendeteksi semua pelanggaran itu. Semoga dengan nasehat-nasehat dan bimbingan lebih bisa mengena. Itulah yang diproteksi oleh Korbintarsis di dalam pengasuhannya. Makanya penggunaan dua fasilitas itu kita atur Hp hanya boleh pas hari Sabtu. Penggunaan laptop pun kita monitor sekali-sekali dirazia. Memang, tak menutup kemungkinan bisa mereka dapatkan melalui dunia maya, *chatting* misalnya. Tapi melalui kesadaran-kesadaran itu semoga tidak terjadi pada mahasiswa Akpol.

O ya, Anda menyebut Akpol itu merupakan pendidikan yang kaya warna. Bisa jelaskan secara lebih konkret?

Kaitannya dengan membangun moral itu juga ada kegiatan agama





yang kita lakukan. Sholat subuh dan wajib menghafal 99 Asmawi Usnnah dan mereka semua sudah hafal semua. Malah drum korpsnya bisa memainkan lagu asmawi usnnah. Kemarin, 22 Mei lalu, mereka tampil di Monas dan membuat semua alumni di sana diam, terharu. Bagaimana mungkin taruna Akpol yang identik dengan kekerasan mampu memainkan Asmawi Usnnah dan membuat orang menangis. Demikian juga dengan yang beragama lain, kita siapkan fasilitas beribadah agar mereka punya tempat dan kesempatan untuk melakukan perenungan. Itulah salah satu upaya kita. Bahwa Kita tidak hanya mengajari aspek akademik saja. Kalau perguruan tinggi di luar Akpol mungkin hanya akademik saja, aspek kesehatan itu urusanmu, aspek moral itu urusanmu, belajar tidak belajar itu urusanmu, yang penting kamu lulus. Tap kalau di Akpol, tiga komponen ini kita gabungkan. Itulah, boleh saya katakan bahwa pendidikan di Akpol ini pendidikan 'kaya warna'. Bukan warna warni, tapi kaya warna. Punya karakter-karakter. Saya tidak bisa mengatakan bahwa taruna akpol

merupakan mahasiswa plus. Dimana plusnya itu saya juga nggak tahu, tapi kalau kaya warna ya saya tahu.

Anda juga mengatakan ingin membangun Akpol sebagai lembaga pendidikan berkarakter... maksudnya?

Saya ingin membangun sebuah lembaga pendidikan berkarakter, yang tentunya tak bisa hanya polisi yang melakukannya. Hal itu sudah saya sampaikan dalam sebuah forum diskusi dan sekaligus keinginan saya mencari *outsourcing* untuk bekerjasama dengan Akpol. Sekarang saya Tanya, stapa yang menghilangkan materi pelajaran budi pekerti? Depdiknas, kan. Katanya budi pekerti itu nggak perlu, cukup di rumah, tapi saya tidak sependapat. Budi pekerti itu harus diajarkan. Juga pelajaran PSPB /Kewarganegaraan. Dua materi ini harus dikembalikan. Selain itu saya juga usulkan, walau saya tau ini tidak mudah, yaitu wajib militer seperti yang dilakukan di banyak Negara, seperti Amerika. Ada wajib militer, tapi tak perlu harus masuk jadi militer. Contohnya di Amerika, semua wajib

militer. Ada pengusaha yang mantan tentara di Perang Vietnam misalnya. Jadi, mantan saja. Ini penting, minimal untuk mempertahankan Negara dalam kondisi darurat, dia sudah tahu basic-nya. Tapi itu semua implikasi positifnya, ya. Artinya, tetap saja ada implikasi negatifnya. Misalnya bisa saja dia menjadi teroris, karena sudah tahu cara memegang senjata, merakit bom dan lain-lain. Karena itu, di situ pentingnya pendidikan yang berkarakter. Di sini pentingnya pelajaran budi pekerti, Kewarganegaraan.

Anda juga pernah melontarkan ide belajar bersama di Akpol selama satu bulan. Bisa jelaskan?

Ya, ada satu keinginan saya untuk bagaimana mendidik kader-kader bangsa itu sekolah bersama selama satu bulan di Akpol. Contohnya begini, di Semarang ini kan selain ada Akpol ada Undip, Unes. Nah saya ingin setiap tahun ajaran baru, mahasiswa baru kita wajibkan untuk mengikuti pembekalan pendidikan wawasan kebangsaan yang tempatnya di Akpol selama satu bulan. Tapi ingat,

Akpol hanya menyiapkan tempat tapi pendidikannya, dosennya, silakan dari luar. Kita beri materi latihan fisik, setelah itu silakan pulang ke kampus masing-masing.

Ini obsesi Anda?

Betul, tapi saya belum berani *me-launching* itu karena saya masih menyusun formulanya apa. Apa yang menjadi tujuan sekolah bersama selama satu bulan ini. Saya kgawatir ada anggapan bahwa ini bentuk dimiliterisasi, dipolisikan. Padahal tujuannya untuk membangun wawasan kebangsaan. Boleh saja sih misalnya di kampus mereka sudah ada orientasi studi wawasan kebangsaan dan mereka kelola sendiri, tak perlu di Akpol. Tapi tampaknya warnanya akan beda.

Terkait dengan kualifikasi kemampuan polisi, apa yang dilakukan Akpol?

Kalau kualifikasi kemampuan kita sudah maksimal untuk memberikan proses pembelajaran kepada para taruna kita. Mereka pun sudah mempraktekkan melalui Lakja, tinggal nanti praktek di lapangan. Tentunya itu sangat tergantung kepada keadaan di lapangan. Termasuk, pembimbingan dari para senior selaku pimpinan di atasnya apakah itu sebagai penyidik, petugas lalulintas atau polisi umum.

Kalau yang lalu, lulusan Akpol itu diorientasikan secara umum untuk mengawaki lima fungsi: Samapta, Lantas, Serse, Binmas dan Intel. Tapi dengan program S1 diharapkan nanti ada tiga macam program peminatan saja, yaitu program Manajemen Kepolsian, program Administrasi Kepolsian, dan program Operasional Kepolsian. Diharapkan setelah lulus mereka nanti bisa mengawaki seluruh struktur yang ada di kepolisian. Contoh, kalau dulu lulusan Akpol hanya jadi juru bayar kan tidak pantas, tapi sekarang bisa menduduki jabatan Bensat. Bensat juga bukan hanya urusan uang-menguang tapi juga merencanakan anggarannya polisi. Dia punya kemampuan menghitung sesuai dengan indeks dan sebagainya dalam rangka menyusun DIPA. Demikian juga kalau dulu hanya ditempatkan di logistik, ngurusin beras dan bensin, tapi ke depan bisa mengurus alusistanya Polri. Intinya, titian karir di atasnya mereka tidak berhenti hanya di keuangan tapi juga bisa ikut jadi asisten perencanaan, asisten SDM dan lain sebagainya. Jadi hampir seluruh struktur jabatan bisa dijabat oleh perwira-perwira dari Akpol yang Strata 1.

Upaya yang dilakukan memperbaiki kualitas moral polisi?

Tentunya dengan bekal dan kemampuan *knowledge, attitude, dan skill*. Nah, aspek *attitude* itulah yang saya bangun melalui kerjasama dengan ESQ Leadership Center yang sudah memiliki jaringan di korwil seluruh propinsi dan ada forum komunikasi alumni sampai di kabupaten. Akpol pun sudah melakukan in-house training ESQ yang diikuti seluruh taruna baik yang baru masuk maupun yang mau lulus perwira. Kalau yang baru masuk itu dalam rangka membangun motivasi semangat belajar. Ada materi yang menggali dari dasar mengenai segala sesuatu itu kita kembalikan kepada sang Pencipta. Kita itu diciptakan oleh siapa, melakukan kegiatan di dunia ini untuk apa, dan semua hal yang sifatnya diingatkan terus pada sang Pencipta. Bahwa kehidupannya sehari-hari itu dikendalikan oleh sang Pencipta, bahwa ada hari akhir, ada dunia, surge, dan neraka. Dengan adanya semua itu, para taruna diharapkan akan terbangun motivasinya untuk belajar dengan baik dan benar. Sedangkan bagi taruna yang mau lulus, itu ada materi untuk memotivasi mereka agar mampu bekerjasama dengan masyarakat. Kemarin waktu mereka mau cuti ke daerah asal masing-masing, mereka kita wajibkan untuk bertemu dengan





para alumni ESQ dari luar Polri. Tugas mereka adalah wajib mendatangi korwil-korwil itu.

Sebegitu besarnya pengaruh ESQ ya?

Orang jujur, bersih dan baik itu kan sebetulnya karakter ya. Tapi dengan ESQ setidaknya bisa mengeliminir sedikit demi sedikit.

Tapi bukan obsesi berwacana kan?

Kalau saya ingin melahirkan calon-calon pemimpin yang bersih, jujur dan baik, itu sebetulnya bukan semacam obsesi yang berwacana ya tapi itu akan kita jadikan kenyataan. Dengan bekal-bekal seperti itu. Dan memang saya tak bisa membekali sendiri, karena itu kita lakukan melalui *networking* yang dibangun. Orang lain yang punya kemampuan silakan datang ke sini, bantulah saya untuk menyiapkan ini. Inilah kader-kader dan ini tidak akan berhenti di lembaga ini saja, tapi setelah dia keluar, jaringan ini harus tetep ada. Artinya kita berharap kepada forum komunikasi alumni ESQ yang ada di daerah itu bersedia untuk menjaga dan memelihara kualitas moral mereka (polisi). Tolong, ini adalah warga masyarakat yang kebetulan

polisi, dan mitra yg sama-sama alumni ESQ. Sehingga, dengan kemitraan itu mereka saling menjaga. Untuk yang dari polisi bisa bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan aturan hukum. Dan mereka diharapkan mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Baik dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam pemeliharaan aspek moral maupun spiritual. Dan itu juga tidak hanya berfokus dalam satu agama. Aspek spiritual itu kan universal, sehingga persaudaraan itu tidak melihat satu agama. Mudah-mudahan dengan lahirnya praktisi-praktisi yang akademisi dan memiliki bibit-bibit atau talenta-talenta karakter moral yang sudah melekat pada dirinya, mereka akan mampu menyebarluaskan kepada orang lain. Tentunya, dengan adanya jaringan forum komunikasi ini nanti mereka akan bisa menyebarluaskan kepada masyarakat yang belum pernah ikut training ESQ, terkait dengan emosional itu tentu mereka akan mengkampanyekan untuk mengikuti studi ESQ. Bukan ESQ-nya ya, tapi artinya membangun kualitas spiritual dan emosional itu menjadi komprehensif. Jadi tidak hanya aspek intelektual, tapi ada tiga yaitu,

knowledge, attitude dan emosional. Dan itu menyatu. Kalau ini kuat tentunya dia sebagai warga Negara dan sebagai manusia kuat juga.

Menurut Anda, bagaimana lingkungan bias mempengaruhi moral aparat?

Pengaruhnya besar. Dalam bentuk apapun, gangguannya cukup besar terutama gangguan yang mengarah pada penyimpangan perilaku dan hukum. Nah tentunya dengan memiliki bekal talenta yang cukup dan punya mitra masyarakat yang mempunyai kadar spiritual yang sama dan bersatu, maka akan mampu mempertahankan diri dari pengaruh lingkungan yang buruk. Dengan adanya kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui jalur-jalur polmas, tentunya gangguan itu semakin berkurang. Memang, gangguan-gangguan itu tak akan pernah habis karena memang situasi global itu memengaruhi sosial budaya masyarakat. Ada yang mengatakan itu omong kosong, karena mereka belum memahami aspek moralnya. Bahwa keberadaannya di masyarakat itu perlu pergaulan yang konkret seperti itu. Nah itu pada tataran bahwa setidaknya dia juga bisa memengaruhi personal-personal polisi yang ada di

lingkungannya yang belum pernah mengenal itu. Paling tidak, dia bisa memberikan satu *guidance* di antaranya dengan *in-house training* itu. Ada memang cara-cara dan metodologi lainnya, selain itu apakah dengan model NAC, Mario Teguh, *outbound*, juga majelis taklim. Artinya, mereka perlu sentuhan seorang pemimpin yang punya kualitas moral dan karakter yang didambakan. Yang mampu menyentuh mereka adalah para pemimpin. Nah perwira lulusan Akpol ini kan kader pemimpin lapis *first line supervisor*. Nanti kita harapkan merekalah yang menyentuh masyarakat pertama kali. Mereka sudah lihat fakta di lapangan dan itulah tantangannya, itulah yang harus mereka sentuh kalau memang belum disentuh oleh pemimpin yang sebelumnya. Diharapkan, mereka yang jadi motornya.

Mereka ini akan ditempatkan di seluruh kewilayah di Indonesia. Ada pemerataan. Diharapkan mereka mampu menggetarkan daerah itu. Ibarat pepatah 'Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung'. Nah, dia harus mampu berbuat seperti itu,

membuat getaran yang mampu menggerakkan perubahan aspek moral. Itu memang tak seberapa tapi implikasinya besar. Kalau satu orang berbuat seperti itu dan 465 lainnya (jumlah lulusan perwira Akpol tahun ini) mau melakukan yang sama, maka suaranya akan nyaring, gaungnya akan menggema. Perwira lulusan akpol 2010 dalam waktu yang tidak terlalu lama bertugas bisa memutihkan apa yang sudah berwarna merah. Sedikit demi sedikit. Jadi paling tidak kalau pemimpin baru saja sudah seperti ini, diharapkan para bawahan atau senior-senior yang belum mengenal ini bisa mengikuti. Karena ini memang baik. Itu keinginan saya dan prediksi saya memang seperti itu. Sumbangsihnya memang tidak seberapa, tapi getarannya akan terdengar nyaring ke depan. Ini belum bisa kita lakukan tahun 2009 karena situasinya berbeda. Saya masuk Akpol pada pertengahan 2009, jadi tidak bisa mengakhiri program pendidikan 2009 dengan program seperti itu.

Banyak yang melihat Akpol itu eksklusif, lalu apa yang Anda lakukan

untuk membuat wajah Akpol lebih ramah?

Ya, memang kecenderungan itu ada. Seperti Akpol ini eksklusif, sampai-sampai masyarakat Semarang saja belum pernah masuk kemari. Makanya, sekarang Akpol ini saya buka untuk umum tiap Sabtu-Minggu. Silakan lihat, silakan nikmati. Sudah banyak masyarakat masuk ke Akpol, sekadar lihat-lihat, dan mereka kaget ternyata di sini ada hutan, burung, walet. Saya malah akan membangun *jogging track*, supaya masyarakat bisa memanfaatkannya. *Jogging track* ini tujuannya untuk memperkenalkan lembaga pendidikan Akpol yang mempunyai luas wilayah seluas 125 hektar. Nah di pinggirnya Akpol ini, yang merupakan sabuk hijau, akan dibangun *jogging track* yang ingin kita jadikan sebagai fasilitas masyarakat maupun keluarga mana saja yang ingin menikmati keindahan bukit di sekitar Akpol. *Jogging track* ini rencananya akan dibagi dalam lima petak seperti model lapangan golf dan setiap jarak 100 meter dibangun semacam *shelter*. Sekarang sudah terbangun satu etape.



ZERO ACCIDENT DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI AKPOL

(Tinjauan Praktis Pendidikan Kaya Warna)



OLEH: BOEDHI SANTOSO¹

ZERO ACCIDENT SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS

Ketika kita semua sepakat bahwa pendidikan di Akpol merupakan pendidikan dinas dimana seluruh biaya operasional pendidikan bagi Taruna dibiayai oleh negara, maka penyelenggaraannya harus dilakukan secara terstruktur, akuntabel dan prospektif. Terstruktur mengandung makna program pendidikan yang dioperasionalkan harus direncanakan dengan baik dan terarah menuju perwujudan standar kompetensi kelulusan. Sementara itu akuntabel mengandung makna bahwa setiap kegagalan yang ada dalam operasional pendidikan mengandung konsekuensi logis "tanggung gugat" yang diemban penyelenggara. Sedangkan prospektif mengandung makna penyelenggaraan pendidikan harus memiliki visi dan misi yang selaras dan mendukung

visi misi organisasi Polri serta demi kepentingan negara secara general. Menyimak ketiga hal tersebut, maka sungguh bukan pekerjaan yang mudah dan "main-main" dalam menyelenggarakan operasional pendidikan di Akpol.

Kerap kali dalam sistem birokrasi terjadi kesalahan konsep dari implementor dalam memformulasikan dan mengimplementasikan responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas dari perspektif administrasi publik mengandung arti tanggung jawab, sedangkan akuntabilitas mengandung arti tanggung gugat. Manakala kita hanya berfikir bahwa semua tugas penyelenggara pendidikan selesai ketika kegiatan belajar mengajar diselenggarakan sesuai ketentuan, sementara itu capaian perolehan tingkat pemahaman dan penilaian

Tetapi manakala kita berfikir bahwa kegagalan peserta didik dalam mencapai tingkatan pemahaman yang optimal termasuk pencapaian optimal dalam bentuk penilaian hasil belajar merupakan kegagalan penyelenggara pendidikan, maka saat itu juga pola pikir kita sudah masuk dalam atmosfer akuntabilitas.





sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik, maka mind set tersebut baru pada tataran responsibilitas. Tetapi manakala kita berfikir bahwa kegagalan peserta didik dalam mencapai tingkatan pemahaman yang optimal termasuk pencapaian optimal dalam bentuk penilaian hasil belajar merupakan kegagalan penyelenggara pendidikan, maka saat itu juga pola pikir kita sudah masuk dalam atmosfer akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan berbicara tentang input, proses dan output pendidikan secara komprehensif. Artinya setiap kegagalan dalam input, proses maupun output menjadi "tanggung gugat" penyelenggara pendidikan. Memang benar ada "special case" dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan oleh Akpol, dimana Akpol tidak dilibatkan secara penuh dalam kegiatan input pendidikan (rekrutment). Namun demikian pada tahap proses dan output, Akpol memiliki otonomi dan berperan penuh. Oleh karena itu prinsip dasarnya penyelenggaraan pendidikan di Akpol tidak boleh "gagal". Prinsip dasar itu yang harus dipegang oleh semua pihak yang ada dalam mesin birokrasi Akpol. Entah itu pihak manajemen, tenaga pendidik, pengasuh bahkan para Taruna Akpol sekalipun harus memegang prinsip "tidak boleh gagal".

Dalam ranah ilmu manajemen, dikenal satu istilah "zero accident" untuk merujuk suatu upaya meminimalisir kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Implementasinya penguatan

pada proses dengan memprediksi kegagalan-kegagalan yang akan dialami jika proses tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu sangat salah apabila ada yang berfikir bahwa implementasi "zero accident" hanya terfokus pada proses atau output saja. Implementor "zero accident" harus berfikir holistik. Implementor harus mampu memprediksi kegagalan-kegagalan yang akan dialami jika proses tidak berjalan dengan baik, sehingga timbul sikap dan tindakan preventif. Jadi "zero accident" mengalami apa yang dinamakan dengan "Slip of main-set and slip of action", manakala implementor tidak mampu (1) merumuskan kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi jika proses tidak berjalan dengan baik dan (2) tidak mampu menunjukkan sikap dan tindakan pencegahan kegagalan dalam proses.

Tidak mudah mengimplementasikan "zero accident" dalam kegiatan pendidikan di Akpol. Setiap pihak harus berfikir secara runtut bahwa jika ada Taruna yang gagal dalam pendidikannya (mengalami remedial atau tidak memenuhi syarat naik tingkat), maka setidaknya semua pihak harus bertanya: (1) sudahkah kita menyiapkan bahan ajar dengan baik?; (2) sudah profesionalkah kita dalam mentransformasikan ilmu kepada peserta didik?; (3) sudahkah kita menciptakan atmosfer belajar yang kondusif?; (4) sudah sesuaikah apa yang diajar dengan apa yang diujikan?; (5) sudahkah kita memotivasi peserta didik dengan

penyampaian keilmuan yang prospektif?; (6) sudah mampukah kita keluar dari tabiat buruk sebagai "guru cerita pengalaman" bukan "guru keilmuan"?; (7) sudahkah kita memberikan ruang aktualisasi akademik kepada peserta didik?, dan sederet pertanyaan panjang yang harus dijawab. Jika jawaban atas pertanyaan di atas cenderung negatif, maka apa yang dicapai oleh peserta didik, entah tingkat pemahaman atau penilaian hasil belajar akan cenderung menunjukkan hasil negatif atau rendah. Jadi jika kondisinya demikian maka janganlah pernah menyalahkan hasil capaian peserta didik, tetapi koreksilah "proses yang telah dilaksanakan", itulah salah satu bentuk implementasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Formulasi dan implementasi "zero accident" dalam penyelenggaraan pendidikan di Akpol sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan yang lalu. Berbagai prediksi-prediksi kegagalan telah diformulasikan oleh sebuah tim yang solid dan berasal dari multi disiplin keilmuan, termasuk melakukan berbagai pembenahan pada aspek akademik, pelatihan dan pengasuhan. Semua dilakukan dalam rangka memperbaiki "proses" operasional pendidikan di Akpol. Proses yang sudah berjalan bukan tidak baik, namun mungkin sudah tidak sesuai "jamannya" sehingga perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Agar pembaharuan proses memiliki "daya dobrak" yang kuat terhadap kelompok-kelompok yang resisten, maka pembaharuan proses dituangkan dalam bentuk Standard Operating



Procedures (SOPs). Dengan kata lain jika SOPs tidak dilaksanakan maka ada kesalahan prosedur dalam proses, dan itu mengandung konsekuensi "tanggung gugat".

Implementasi "zero accident" dilaksanakan oleh Akpol untuk menuju keberhasilan peserta didik dengan nilai capaian yang optimal dari standar (tidak sekedar lulus, namun prestasinya optimal), sehingga mendukung perwujudan visi dan misi Akpol (Akpol 45 tahun striving for excellence). Beberapa aktualisasi dari implementasi "zero accident" adalah: (1) seluruh tenaga pendidik internal wajib melaksanakan pelatihan mengajar sebelum mendidik para Taruna; (2) optimalisasi tugas subbag evadasi dalam melakukan evaluasi mikro maupun makro di bidang pendidikan; (3) memposisikan pengasuh sebagai mitra diskusi di kelas dan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mandiri di flat; (4) dalam hal latihan, pengasuh berperan untuk meningkatkan kebugaran dan kemampuan jasmani para Taruna sehingga kuat dan prima; (5) Para tenaga medis wajib masuk hunian agar terpantau kesehatan lingkungan dan kesehatan Taruna sehingga terhindar

dari sakit, dampaknya seluruh Taruna dapat mengikuti kegiatan pendidikan di Akpol secara optimal; (6) dan sebagainya.

ZERO ACCIDENT DAN PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN "KAYA WARNA" DI AKPOL

"Zero accident" diterapkan pihak manajemen Akpol untuk mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan dalam proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan sehingga mendukung secara optimal pembentukan karakter dan moral para Taruna Akpol. Dengan kata lain proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan harus sejalan dan diarahkan dalam rangka pembentukan karakter dan moral yang kuat pada setiap diri Taruna Akpol.

Wynne berpendapat bahwa istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" (menandai), yang lebih terfokus pada melihat tindakan atau tingkah laku. Sementara itu Aristoteles menyebutkan bahwa karakter terbentuk dalam diri setiap orang dikarenakan perbuatannya yang berulang-ulang dan sudah menjadi

kebiasaan.

Lebih lanjut dijelaskan Wynne bahwa karakter mengandung dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah orang tersebut memmanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memmanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan "personality". Seseorang baru bisa disebut sebagai "orang yang berkarakter" (a Person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Me-rancang bangun suatu sistem pendidikan yang berkarakter memerlukan sebuah proses pendidikan yang holistik, simultan dan berkesinambungan. Dalam sistem pendidikan tersebut harus dikembangkan beberapa aspek "knowing to good, loving the good and acting the good". Dengan kata lain sebuah lembaga pendidikan dikatakan telah memiliki sistem pendidikan yang berkarakter, apabila sistem proses pembelajarannya mengarahkan peserta didik untuk "tahu, mencintai

dan melakukan hal-hal yang mulia atau berperilaku baik menurut ukuran normatif yang berlaku di tengah masyarakat". Jadi bukan semata hanya mengasah kemampuan akademis peserta didik. Tentu kita sepakat buat apa memiliki lulusan yang cerdas namun tidak memiliki perilaku yang baik, bukan?

Disadari atau tidak, saat ini berkembang fenomena "salah kaprah" yang ditunjukkan oleh sebagian besar penyelenggara pendidikan. Mereka mengembangkan pendidikan yang hanya berorientasi kepada pencapaian tertinggi nilai akademik dari para peserta didiknya. Hari-hari peserta didik "dijejali" dengan beragam pengetahuan akademik yang notabene hanya mengembangkan aspek kognitif peserta didik saja. Amat jarang ditemui penyelenggara pendidikan yang concern mengembangkan aspek afektif (yang bersifat perasaan) kepada peserta didiknya. Kalau boleh mengistilahkan, peserta didik tersebut diciptakan seperti "robot-robot modern", cerdas namun tidak berperasaan. Jika sudah demikian, muncullah perilaku yang kaku, kejam dan tidak kreatif, hanya bisa berjalan ketika diinstruksikan oleh sebuah perintah, tidak memiliki inisiatif, daya inovasi dan daya nalar yang handal untuk mengembangkan diri.

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa jika aspek kognitif dan afektif memiliki porsi yang seimbang untuk dikembangkan pada peserta didik, maka yang bersangkutan akan secara alamiah merepresentasikan aspek psikomotoriknya dengan baik. Kombinasi pengembangan kecerdasan (kognitif) yang baik dan perasaan (afektif) yang baik akan melahirkan perilaku (psikomotorik) yang baik. Singkatnya perilaku peserta didik terbentuk dari kombinasi kemampuan mengelola aspek kognitif dan afektifnya.

Oleh karena itu jika sebuah lembaga pendidikan ingin menghasilkan lulusan yang memiliki perilaku yang sesuai dengan kaidah normatif yang berlaku di masyarakat pada umumnya, maka galilah dan tumbuhkembangkanlah secara baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik para peserta didik. Inilah yang dinamakan lembaga pendidikan "kaya warna" yaitu lembaga yang mengembangkan sistem pendidikan dengan memperhatikan dan mengembangkan aspek kecerdasan (kognitif), perasaan (afektif) dan

perilaku (psikomotorik) peserta didik secara seimbang.

Lembaga pendidikan "kaya warna" akan meluluskan peserta didik yang "kaya warna" pula. Bagaikan pelangi, mereka akan muncul sebagai sosok yang indah untuk tidak hanya sekedar dilihat tapi juga "indah" cara berfikirnya, "indah" akan perasaannya dan "indah" perilakunya. Penumbuhkembangan cara berfikir, berperasaan dan berperilaku yang baik secara berulang-ulang dan dijadikan kebiasaan akan bermuara pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang kuat dan utuh. Inilah keterkaitan antara proses dan output dari pendidikan berkarakter.

Proses pendidikan yang dijalankan oleh Akpol akan berkontribusi banyak terhadap output pembentukan karakter para Taruna Akpol. Penerapan "zero accident" dengan spektrum yang sangat luas, akan membawa kita pada pemahaman bahwa untuk menghindari kegagalan dalam mewujudkan karakter yang kuat pada diri Taruna Akpol, dapat dimulai dengan melakukan berbagai pembenahan pada "proses" pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Pembenahan tersebut harus berorientasi pada keseimbangan representasi performance kognitif (pemikiran), afektif (perasaan) dan

psikomotorik (keterampilan) para Taruna Akpol.

Implementasi "zero accident" yang tepat, terukur dan terstruktur dalam konteks pendidikan karakter akan menghasilkan output-ouput yang berkarakter. Mengapa dikatakan demikian? karena prosesnya sudah diarahkan untuk internalisasi karakter pada setiap output. Dengan demikian jika proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan di Akpol sudah "diwarnai" dengan pendidikan berkarakter, pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek kognitif; afektif; dan psikomotorik, maka akan lahir Taruna Akpol generasi penerus Polri yang memiliki karakter "kaya warna" sosok petugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Semoga

Pustaka:

1. Prof. Drs. H. Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hal. 26-28.
2. Hernowo, "Mengobrolkan Belajar Mengajar Berbasis Emosi", Bandung: Mican Learning Centre, 2005
3. Daniel Goleman, et al., The Creative Spirit, A Plume Book, New York, 1993

MARI MAJU BERSAMA MENUJU STRIVING FOR EXCELLENCE

¹⁾ Penulis saat ini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian, Semarang.

